

Alun-Alun Lama dan Wilhelmina Plein:
**Ruang Terbuka Kota di Pusat Pemerintahan Tradisional dan Kolonial
di Semarang**

R. Siti Rukayah,* Septana Bagus Pribadi, Annica Etenia

Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, S.H. Tembalang, Semarang - Indonesia

*Penulis korespondensi: sitirukayah.tutut@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v6i2.37479>

Diterima/ Received: 26 Maret 2021; Direvisi/ Revised: 9 November 2021; Disetujui/ Accepted: 24 November 2021

Abstract

Design of the government city center in the traditional period has proven to reveal the richness of Indonesian culture. One of them is evidenced by the values of local wisdom that still maintained from generations even though various challenges have been faced, including the penetration of foreign influences. The traditional center of government is reflected in Semarang's Old City Square [Alun-Alun Semarang]. Its existence coincided with the center of colonial administration (Kantor Gouverneur van Java's Noord-Oostkust, 1754–1761) on Jalan Bojong (now Jalan Pemuda Semarang) which lasted until the 1970s. Unfortunately, after the 1970s, the alun-alun and the traditional government center (Kanjengan) disappeared and only left a cultural heritage in the form of mosque buildings and the dhugderan tradition mostly became an icon of the identity of traditional cities in Java. By using the historical method in relation to the use of contemporary sources, this study reveals the existence of the alun-alun as an open space for the traditional rulers and Taman Wilhelmina Plein as an open space for the colonial government, both of them were located in the same city corridor. The Jalan Bojong Corridor is part of de Groote Postweg, Jalan Raya Pos stretched from Anyer to Panarukan. In Semarang, this road connects the fort area which is now the Old City and Alun-Alun Semarang. The interesting issue is the dualism of road section in colonial government is reflected and it is side by side with the traditional center of government.

Keywords: City Planning; Corridors; Traditional Architecture; Colonial Architecture; Lokal Wisdom.

Abstrak

Desain pusat kota pemerintahan pada masa tradisional telah terbukti mengungkap kekayaan kebudayaan Indonesia. Hal itu salah satunya dibuktikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipertahankan dari generasi ke generasi meskipun telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk penetrasi pengaruh asing. Pusat pemerintahan tradisional tercermin di Alun-Alun Lama Semarang. Keberadaannya bersanding dengan pusat pemerintahan kolonial (Kantor *Gouverneur van Java's Noord-Oostkust*, 1754–1761) di Jalan Bojong (sekarang Jalan Pemuda Semarang) yang bertahan hingga 1970-an. Sayangnya, setelah 1970-an, alun-alun dan pusat pemerintahan tradisional (Kanjengan) hilang dan hanya menyisakan warisan budaya berupa bangunan masjid dan tradisi *dhugderan* yang menjadi penanda karakter identitas kota tradisional di Jawa. Dengan menggunakan metode sejarah dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber-sumber sezaman, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keberadaan alun-alun sebagai ruang terbuka pemerintah tradisional Semarang dan Taman Wilhelmina Plein sebagai ruang terbuka pemerintah kolonial yang keduanya terletak pada sebuah koridor kota yang sama. Koridor Jalan Bojong merupakan bagian dari *de Groote Postweg*, Jalan Raya Pos yang terbentang dari Anyer hingga Panarukan. Di Semarang, jalan ini menghubungkan kawasan benteng yang sekarang menjadi Kota Lama serta Alun-Alun Lama Semarang. Hal yang menarik adalah bahwa pada ruas jalan ini tercermin dualisme pemerintahan karya kolonial dan berdampingan dengan pusat pemerintahan tradisional.

Kata Kunci: Perancangan Kota; Koridor Jalan; Arsitektur Tradisional; Arsitektur Kolonial; Kearifan Lokal.

Pendahuluan

Konsep tata ruang pusat pemerintahan di berbagai negara memiliki keunikan sendiri. Hasil penelitian penulis pada 2014 yang didanai oleh *Sumitomo Foundation* membuktikan bahwa pusat kota pemerintahan kekaisaran di Kyoto, Nara, dan Yogyakarta memiliki kesamaan tata letak dalam perancangan kota kunonya. Pusat kota ditata berdasar aturan dan pola untuk menjaga keseimbangan yang harmonis antarmakrokosmos dan mikrokosmos. Dengan kata lain, raja dan kerajaan menjadi pusat dari perencanaan kota.

Di Jawa sendiri konsep tersebut terbentuk karena adanya pengaruh India (Hindu), China (konfusianisme), dan Arab (Islam). Dalam Buku *Palace and Urban Design* (2016), negara dan kota-kota di jalur sutra (baik darat maupun laut) ditemukan adanya konsep pusat kota yang hampir mirip, yaitu kerajaan sebagai pusat tata kota, sumbu utara-selatan, pola *grid*, serta terdapat komposisi bangunan kerajaan berupa bangunan peribadatan dan pasar. Bangunan peribadatan dan pasar merupakan elemen yang saling berhubungan karena jalur sutra merupakan jalur perdagangan, budaya, dan siar.

Perencanaan pusat kota mulai dari Kerajaan Hindu Majapahit, Kesultanan Islam hingga Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta merupakan bukti awal adanya keberlanjutan sejarah perencanaan kota tradisional di Indonesia yang berdasar pada kepercayaan kosmologis pada awalnya (Rukayah, Dhanang, dan Endang 2016). Konsep ini berlanjut Ketika Pemerintah Kolonial Belanda juga merencanakan kota-kota di pantai utara Jawa sebagai kota pertahanan dari serangan bangsa Eropa lain yang dihubungkan oleh Jalan Raya Pos. Daendels misalnya, pada 1809-1811 membuat Jalan Raya Pos. Pembangunannya memiliki tujuan ekonomi dan militer yang meliputi seluruh Pulau Jawa, terlihat dari jalur yang menghubungkan kota-kota penting, termasuk Semarang (Nas 2002). Jalan Raya Pos sepanjang 1000 km membentang di sisi utara Pulau Jawa tersebut menghubungkan kota Anyer hingga Panarukan (Toer 2005).

Sementara itu, jalur yang melintasi Semarang memiliki nama *Bojongweg*. Masyarakat Kota Semarang sering kali menyebutnya Jalan

Bojong yang merupakan terjemahan dari *Bojongweg*. Saat ini, jalan tersebut telah berganti nama menjadi Jalan Pemuda (Atmiko 2001). Jalan Bojong terbentang dari arah kawasan Bulu berbelok dan melewati alun-alun hingga menuju Kota Lama yang dibangun pada 1678. Letaknya persis di sisi utara alun-alun yang berfungsi sebagai ruang terbuka dan Kanjengan yang dibangun pada sekitar 1670. Sketsa morfologi pusat memperlihatkan bahwa pemerintahan kota lama terbelah oleh jalur jalan ini (Rukayah 2010). Diketahui bahwa jalur jalan yang bernama Jalan Bojong digambarkan sebagai jalan yang terindah di Pulau Jawa (Liem 2004; Budiman 1978). Pada jalan ini dibangun kantor residen (sebelum menjadi Gedung Papak) yang dibangun pada 1787 bersebelahan dengan Alun-Alun Lama Semarang dan kantor Gouverneur van Java's Noord-Oostkust yang dibangun pada 1754-1761 tepat di kawasan Bulu. Gambaran keindahan Jalan Bojong tampak pada serial peta Kuno dan foto-foto kuno Semarang dari KITLV.nl dan Tropenmuseum. Bangunan Kantor Gouverneur van Java's Noord-Oostkust dan Kota Lama menjadi simpul magnet dengan Jalan Bojong sebagai penghubungnya.

Di tengah jalur penghubung tersebut terdapat pusat pemerintahan tradisional di Alun-Alun Lama, sebagaimana tata ruang pusat pemerintahan tradisional memiliki pola yang terdiri atas alun-alun di tengah, keraton atau kantor pemerintahan di sisi selatan, dan bangunan peribadatan di sisi barat (Rukayah, Roesmanto, and Sukawi 2013). Pola itu merupakan keberlanjutan konsep pusat kota yang telah diterapkan dalam tata kota masa Kerajaan Majapahit (Budihardjo 2012). Namun demikian, di era setelah runtuhnya Majapahit, konsep kota kesultanan Islam di Jawa tidak merujuk sepenuhnya pada konsep Hindu yang semula diterapkan di Majapahit. Hal itu berdasar hasil penggambaran kembali reruntuhan Majapahit oleh Henri Maclaine Pont, seorang arsitek Belanda sekaligus orang pertama yang melakukan penggalian amatir di situs Trowulan (Rukayah dan Malik 2012). Konsep pusat kota Majapahit yang menjadi rujukan tidak tertulis bagi raja-raja penerusnya seperti Kesultanan Demak, Banten, Cirebon, dan Mataram Islam telah diadaptasi dengan penambahan masjid di sisi Barat alun-alun

(Rukayah, Respati, dan Susilo 2016). Adaptasi lain terlihat dari pusat kota kesultanan Islam yang berlokasi di jalur sutra laut. Oleh karena menjadi tempat kontak kegiatan perdagangan, budaya dan siar agama, maka alun-alun dibuat bernuansa multiwarna (Bakar 1955). Di sisi utara alun-alun terdapat pelabuhan tempat pendaratan para pedagang dari Gujarat, Cina, India, dan Persia (Mulyana 1968; Suryanegara 2009). Salah satu bukti adanya kontak dan tempat pendaratan pada pedagang dari berbagai belahan dunia adalah penemuan jejak perkampungan multietnis di kota-kota pantai utara Jawa (Ariestadi dan Wulandari 2017; Rukayah *et al.* 2018)

Studi mengenai pusat kota tradisional di Jawa telah banyak dilakukan oleh ahli sejarah, antropologi, dan arkeologi. Salah satunya dilakukan oleh Yuliati (2019) yang mengungkap sejarah Kota Lama Semarang. Kajian Yuliati (2019) difokuskan pada pengembangan Kota Lama Semarang sebagai aset Pariwisata Budaya. Disebutkan bahwa Kota Lama awalnya adalah kawasan benteng yang dibangun oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) (1602-1799) pada akhir abad ke-17 setelah terjadi perjanjian antara Kerajaan Mataram di bawah Amengkurat II. Perjanjian itu memberikan hak kepada VOC atas wilayah Pantai Utara-Timur Jawa, jika berhasil mengalahkan perlawanan Trunajaya dari Madura terhadap Mataram. VOC berhasil mengalahkan Trunajaya dan kompeni dagang tersebut memilih area di dekat pusat Kabupaten Semarang dan Kali Semarang sebagai tempat bermukim agar dapat mengawasi pemerintahan tradisional (Jawa). Berdasar nilai-nilai historis Kota Lama, Yuliati (2019) mengungkap upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menjadikan Kota Lama sebagai aset Pariwisata Budaya.

Kendati kajian tersebut cukup komprehensif karena menggambarkan Kota Lama dari waktu ke waktu, namun pembahasan manakala pusat kota tradisional sebagai pusat pemerintahan tradisional bersanding dengan pusat pemerintahan kolonial belum mendapatkan perhatian. Tujuan penelitian ini adalah menguak keberadaan alun-alun sebagai ruang terbuka yang merepresentasikan pemerintah tradisional dan taman *Wilhelmina Plein* sebagai ruang terbuka pemerintah kolonial yang merepresentasikan gaya modern. Keduanya

terletak pada sebuah koridor kota yang sama. Dalam studi ini ada kebaruan pengetahuan bahwa penempatan kantor gubernur pemerintah kolonial terletak dalam tata ruang kota yang sama dengan pemerintah tradisional, yaitu berada pada *de Grootte Postweg*.

Dalam perkembangan sejarah kota, baik era prakolonial maupun kolonial, pengungkapan eksistensi pusat pemerintahan tradisional adalah keniscayaan. Hal itu karena terdapat beberapa kearifan lokal konsep-konsep tradisional yang masih bertahan hingga kini (Mustaruddin *et al.* 2011). Kearifan lokal yang terkandung telah mengungkapkan kekayaan kebudayaan di Indonesia yang terbukti mampu bertahan dari generasi ke generasi (Dahlhani, Faqih, dan Hayati 2015). Kearifan lokal yang terpatut telah menjadi pengetahuan yang digunakan oleh generasi sebelum kita dan masih dapat digunakan untuk menghadapi persoalan kehidupan hari ini.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menguak keberadaan alun-alun sebagai ruang terbuka pemerintah tradisional dan taman *Wilhelmina Plein* sebagai ruang terbuka pemerintah kolonial yang keduanya terletak pada sebuah koridor kota yang sama. Oleh karena objek studi tergolong sebagai kawasan bersejarah, maka pendekatan sumber sejarah penting dilakukan (Kuntowijoyo 1994). Guna mengatasi keterbatasan dokumen-dokumen tertulis yang tidak banyak dan sering tidak terawat, maka digunakan gambar dan foto kuno sebagai sumber. Menurut Pole (2004), gambar dan foto kuno dapat mengungkap narasi secara lebih lengkap. Gambar/foto dan peta kuno yang mengungkap tata ruang di kawasan kajian ini diperoleh dari Tropen Museum, kitlv.nl dan Atlas Mutual Heritage. Sementara itu, metode untuk mengukur kearifan lokal dilakukan dengan mengukur cara orang memandang lingkungan dahulu dalam konteks saat ini (Anwar *et al.* 2012). Caranya adalah dengan mengukur keterikatan mereka dengan tempat tersebut. Dalam rangka untuk menyelidiki pandangan orang di masa lalu terhadap lingkungan hidup mereka; beberapa metode yang terkait dari studi ikonografi dapat

dimodifikasi dan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Untuk mengungkap eksistensi kawasan dan bangunan di masa kini, maka peneliti melakukan survei di lapangan guna menjawab tujuan penelitian tentang eksistensi dari pusat pemerintahan tradisional dan kolonial.

Lanskap Pusat Pemerintahan dan Ruang Terbuka Tradisional

Penelitian terdahulu tentang pusat kota tradisional alun-alun di kota-kota di Jawa (Rukayah and Malik 2012), Alun-alun Yogyakarta, alun-alun Semarang memperlihatkan konsep kosmis yang membandingkan Yogyakarta dan Kyoto di Jepang. Dalam konsep kota kosmis, kota merupakan tiruan jagad raya dan dinamakan jagad kecil. Oleh karena raja menjadi pusat orientasi, maka kedudukannya berada di pusat/tengah. Konsep kota kosmis sendiri memiliki nilai-nilai kearifan lokal (Lombard 1996), di mana raja sebagai pendiri kota menata kota sedemikian rupa menjadi sebuah tiruan alam semesta.

Ide konsep kosmis sendiri merupakan pengaruh budaya India dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Hal itu dapat terlihat dalam konsep negara dan pemerintahan serta kedudukan raja. Pendirian kesultanan Islam di wilayah Asia Tenggara tidak lepas dari para penyebar agama Islam yang hingga kini masih diyakini berasal dari Arab, Gujarat, dan bahkan Tiongkok. Baik konsep India maupun Tiongkok berusaha menyelaraskan hubungan antara raja, dewa, dan alam semesta. Menurut Geldern (1982), perwujudan dari penyelarasan hubungan antara raja, dewa dan alam semesta diwujudkan dalam sebuah konsep makrokosmos dan mikrokosmos.

Kendati demikian, pola kota kesultanan Islam di Jawa ternyata keluar dari pakem tersebut (Rukayah, Respati, and Susilo 2016). Dalam agama Islam tidak dikenal adanya energi besar selain Allah. Peran raja sebagai *khalifatullah ing alaga sayyidin panatagama* membentuk fungsi alun-alun yang mencerminkan ruang siar agama Islam. Adapun peranan raja bukan hanya sebagai pemimpin negara melainkan juga pemimpin agama. Dalam menjalankan peranan inilah alun-alun memiliki fungsi sebagai ruang publik, ruang

untuk *seba* (menghadap) terhadap rajanya, dan ruang siar agama Islam.



Gambar 1. Mangkubumi di Banten Rapat Akbar di Tengah Alun-alun.
Sumber: KITLV.

Ruang siar Islam yang memadukan kegiatan pemerintahan dan keagamaan disajikan di alun-alun sebagai pesta rakyat seperti *Garebeg*, *Sekaten*, *Dhugdheran*, *Jamasan Keris*, dan lain-lain. Hampir semua pesta rakyat itu masih berlangsung hingga kini. Berdasar sejarahnya, di Banten, ritual semacam itu diselenggarakan di alun-alun karena adanya kuasa dari Raja. Selain di Banten, fenomena semacam itu juga terjadi di salah satu pusat kebudayaan Jawa, yaitu Surakarta sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 (Talens 1993).

Lanskap Pusat Pemerintahan dan Ruang Terbuka Kolonial

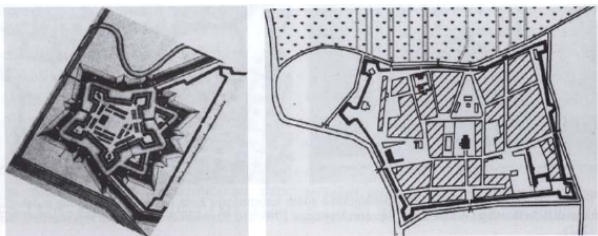
Ruang terbuka publik di pusat kota di beberapa negara dikenal dengan istilah *place* (Bahasa Inggris), *Platea* (bahasa Latin), *plaza* (Bahasa Spanyol) atau *piazza* (Bahasa Italia), dan *alun-alun* (Bahasa Indonesia). Zucker (1959) dan Moughtin (2003) menyatakan bahwa ruang publik dikelilingi oleh bangunan yang tidak dilalui oleh hilir mudik lalu-lintas. Hal itu karena ruang publik berfungsi sebagai tempat yang nyaman untuk peristirahatan, kegiatan pasar, dan upacara rakyat. Di ruang publik itu pula terdapat kantor pelayanan umum, balai kota, dan lain-lain (Krier 1991).

Ruang publik di negara Belanda sendiri pada umumnya sama seperti ruang publik di negara Eropa lain. Ruang publik dapat pula merupakan halaman bersama dari beberapa gedung dengan gedung balai kota, dilengkapi dengan lapangan yang disebut *stadhuisplein*. Konsep inilah yang

diterapkan dalam perancangan kota-kota di Indonesia di era kolonial, termasuk Semarang (Colombijn 2012).

Perkembangan Kota Semarang dimulai sejak perkembangan embrio kota yang berpusat di Alun-Alun Lama Semarang. Pusat kota ini berkembang ke arah barat dan timur mengikuti pola jalan jalur *postweg*. Kawasan sisi barat atau kawasan Bojong-Bulu menjadi *downtown* kedua setelah kawasan benteng di sisi timur alun-alun (Harsritanto 2009). Kota Benteng Semarang merupakan perkembangan dari Benteng Vijfhoek van Samarangh yang tergambar dalam peta tahun 1695. Sejauh ini, belum ada peneliti yang menemukan catatan mengenai kapan Benteng Vijfhoek van Samarangh dibongkar. Sementara itu, pengembangan kota yang kelilingi benteng (sekarang dikenal sebagai Kota Lama) diperkirakan terjadi pada sekitar pertengahan abad ke-18. Namun demikian, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengembangkan Semarang sebagai kota modern pada 1824. Hal itu berimplikasi pada benteng yang terhubung dengan Jalan Bojong. Pada masa pengembangan kota, benteng yang terhubung dengan Jalan Bojong dirobokkan. Di ujung Jalan Bojong itulah terletak de Vredeistein dan Taman Wilhelmina Plein.

Pada dua kawasan benteng terdapat pemukiman besar, yaitu pemukiman Belanda di bawah pemerintahan gubernur Belanda yang mengurus daerah di dalam benteng. Sementara itu, di dekat pusat pemerintahan tradisional terdapat pemukiman multietnis (Rukayah *et al.* 2021).



Gambar 1. Perkiraan posisi Benteng Semarang pada Kota Lama

Sumber: KITLV.

Pada masa VOC, Semarang masuk dalam wilayah pemerintahan Susuhunan Surakarta, tetapi kemudian digadaikan ke VOC, karena mereka meminjam uang dari VOC dalam jumlah yang sangat besar. VOC kemudian membangun area militer dan kawasan perdagangan yang strategis di

dalam sebuah kawasan yang dikelilingi benteng. Kawasan benteng dapat dilihat dalam peta berangka tahun 1756 (lihat Gambar 2). VOC membangun benteng dengan tujuan untuk mengawasi masyarakat sekitar (Purwanto 2005).

Tillema dalam sebuah buku berjudul *Kromobelanda* menggambarkan kawasan benteng yang berbentuk segilima dengan lima buah bastion (menara pengintai) (Dewi dan Sari 2012). Di luar benteng terdapat pusat pemerintahan tradisional dengan masyarakat Jawa dan Etnis Melayu yang mendiami. Secara ekonomi, mereka mayoritas merupakan masyarakat kelas bawah yang bekerja sebagai buruh/pekerja, pedagang kecil, dan nelayan. Sementara itu, masyarakat etnis Cina sudah mulai memainkan peranan penting di bidang ekonomi, hanya sebagian yang menjadi pekerja dan termasuk masyarakat kelas bawah (Krisprantono 2009).

Pada akhir abad ke-18, situasi menjadi membaik dan Benteng sekitar kota berangsur-angsur mulai dirobokkan mulai dinding bagian barat hingga sekarang menjadi Kota Lama yang menjadi ikon Kota Semarang saat ini.

Wilhelmina Plein sebagai Ruang Terbuka

Terletak di ujung Jalan Bojong, *Wilhelmina-plein* dibangun pada 1911. Lokasi ini merupakan ruang terbuka dengan fasilitas *open muziektient* berupa kopel di tengah taman. Bangunan ini merupakan upaya pemberdayaan potensi bermusik masyarakat yang cukup elegan pada masa itu.

Seiring perkembangan zaman, taman *Wilhelmina* berubah menjadi Taman Merdeka dan berdirilah sebuah monumen Tugu Muda dengan lahan yang lebih sempit karena kebutuhan sirkulasi. Tugu Muda Semarang didirikan pada 1945. Keberadaan Tugu Muda telah menggantikan *Wilhelmina plein* yang pada awal pembentukannya merupakan taman dengan fasilitas teater musikal (lihat Gambar 3).

Pada pertengahan abad ke-17 kawasan Bulu dengan *Wilhelmina-plein* menjadi *downtown* ke dua setelah alun-alun. Pemandahan resmi Gubernur Pantai Utara-Timur Jawa yang sekarang dikenal sebagai Wisma Perdamaian (*de Vredestein*) semakin menghidupkan ruang terbuka tersebut. Jalan Bojong telah menghubungkan kawasan Bulu dan Kota Lama (*little Netherland*)

yang berakhir di *de Verdestein* yang memiliki halaman luas. Sebelum dibuat taman, *Wilhelmina plein* merupakan bagian dari halaman *de Verdestein*, dan *Bodjongsch-plein*.



Gambar 3. Taman Tugu Muda dahulu dikenal juga dengan nama *Wilhelmina-plein* sebagai plaza /ruang terbuka dengan fasilitas *open muziektient* (teater musikal terbuka)

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

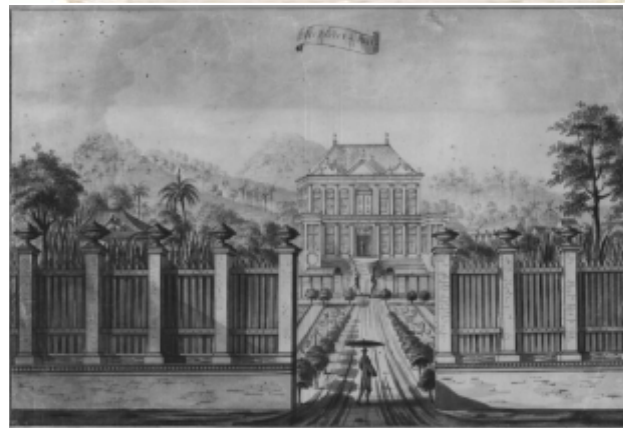
Kelengkapan sebagai pusat kota pada abad ke-18 bertambah dengan adanya fasilitas transportasi berupa jalur trem. Seiring dengan itu, pihak swasta diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar *de Vredestein*. Pada masa selanjutnya, perkembangan area *Bodjongsch-plein* mendorong kegiatan perkotaan ke arah *Beatrix laan* (sekarang Jalan Sugiyopranoto), *Pietersijthof laan* (sekarang Jalan Pandanaran), dan *Koningin Emmalaan* (sekarang Jalan Dr. Sutomo).

Dari de Vredestein hingga Wisma Perdamaian

Pada 1690 Gubernur Pantai Utara-Timur Jawa pindah dari Jepara ke Semarang. Dalam tahun itu mulai dibangun benteng lebih permanen berbentuk segi lima, yang oleh orang Belanda dinamakan *de Vijfhoek* dan selesai dibangun pada 1708. Selanjutnya pada 1741 sampai 1760 dibangun pula tembok-tembok mengelilingi kawasan benteng. Sementara itu, Kota Semarang segera berkembang di luar benteng. Hunian orang Belanda berkembang di daerah Bojong dan Randusari.

Pada 1754, dibangun pula *Vredestein* sebagai istana kediaman Gubernur Nicolaas Harting. Kini, fungsi bangunan tersebut menjadi bagian dari bangunan Gubernur Jawa Tengah. Nama bangunan tersebut kini adalah Wisma

Perdamaian, terjemahan dari nama aslinya (lihat Gambar 4).



Gambar 3. *Vredestein* by Rach, Johannes *sketcehs in pen en penseel*
Sumber: KITLV.

Kompleks *de Vredestein* juga pernah digunakan untuk beberapa kantor dinas. Berturut-turut dinas yang pernah mendiami Wisma Perdamaian antara lain Kantor Dinas Sosial dan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, serta Kantor Wilayah Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sampai dengan tahun 1999. Selain itu, Wisma Perdamaian juga difungsikan sebagai Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah (Roesmanto 2003).

Pemerintah Kolonial Belanda sendiri terinspirasi konsep ruang terbuka di negaranya ketika mereka merancang kota baru di Indonesia. Sebagai contoh adalah ruang terbuka di Amsterdam yang lebih condong pada fungsi sebagai ruang publik. Menurut van Melik, van Aalst, dan van Weesep (2009) di Belanda ruang publik benar-benar bersifat publik; yaitu tidak dicakup oleh lebih banyak aturan dalam peraturan daerah dan dapat diakses oleh semua kalangan. Selain itu, terdapat *private sector area* yang dikelola

oleh investor swasta dan kerja sama dengan pemerintah Belanda, misalnya di area Rotterdam's Beursplein yang dikembangkan ING Bank dan konglomerat C&A. Walaupun jumlah *private sector* di Belanda tidak banyak dibandingkan di Inggris, namun peranan swasta dalam membangun *public space* sangat berpengaruh, bahkan mereka juga berkontribusi dalam desain (Langstraat dan van Melik 2013).

Ada beberapa ruang terbuka sangat terkenal di Amsterdam yang berbentuk bujur sangkar meskipun tidak murni. Masing-masing ruang terbuka memiliki fungsi dan keunikan bangunan, sehingga dapat dikatakan memiliki ciri khas tersendiri.

Mempertahankan Nilai Kearifan Lokal dalam Ruang Publik Tradisional

Pusat kota pemerintahan tradisional yang berada di pesisir Utara Jawa memiliki keunikan. Di sekitar pantai atau pelabuhan banyak terdapat orang Melayu dan Bugis bahkan Makasar yang bermukim. Demikian pula di Kota Semarang. Pada sisi barat tepi Kali Semarang bertumbuhan perkampungan orang Jawa. Sementara itu, perkampungan Tionghoa berkembang lebih ke selatan (Rukayah, Susilo, dan Abdullah 2018).

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal, bahwa alun-alun dibangun dengan tujuan politis, yaitu menjadi ruang terbuka yang mempertemukan raja/pemimpin dengan rakyatnya. Namun demikian, pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, fungsi alun-alun tidak lagi murni sebagai ruang untuk menghadap raja dan siar agama, setelah dibangun sebuah pasar di dekat alun-alun (fenomena di Semarang dan Kanoman Cirebon). Hal itu dilakukan guna menurunkan wibawa pemerintah tradisional. Selain itu, Pemerintah Kolonial Belanda juga menambahkan penjara dan ruang untuk hukuman mati. Guna mengawasi jalannya pemerintahan tradisional, sistem dualisme pemerintahan dimunculkan dengan adanya *resident* yang biasanya berlokasi di dekat pusat pemerintahan tradisional.

Kendati kewibawaannya telah dikurangi, pusat pemerintahan tradisional di Alun-Alun Lama tetap menjadi sebuah *public space* yang difokuskan

pada kegiatan kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, setidaknya ada nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*) dan menunjukkan kebijaksanaan, penuh kearifan, dan bernilai tinggi. Nilai yang tertanam kemudian diikuti dan masih berlangsung hingga kini (Badan Pariwisata Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan 2011).

Sementara itu, Antariksa (2008) menyebutkan bahwa hal yang paling penting dalam pengetahuan lokal adalah proses sebelum menerapkan tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai alam untuk dorongan dan mengajarkan bagaimana 'membaca' potensi alam dan menulis ulang sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat. Kepekaan membaca alam tersebut menjadi budaya masyarakat Jawa. Menurut (Koentjaraningrat 1985), budaya adalah kompleksitas ide, pemikiran, nilai-nilai, norma-norma, aturan, dan sebagainya. Sementara itu, Rapoport dan El Sayegh (2005) mendefinisikan budaya sebagai sistem aturan yang secara simbolis berlaku dari generasi ke generasi melalui enkulturasi (sosialisasi) dan akulturasi dengan imigran yang diajarkan melalui bahasa, perilaku, dan lingkungan binaan. Perubahan semacam itu benar-benar terjadi, meskipun perubahan yang diinginkan adalah perubahan tanpa menghilangkan karakteristik inti dari budaya. Dengan demikian, bersandingnya pusat pemerintahan kolonial dan lokal menyisakan bagian-bagian yang masih dipertahankan.

Seperti diketahui bahwa antara pusat pemerintahan tradisional yang terdiri atas alun-alun dan masjid terdapat kearifan lokal dalam penataannya. Alun-alun merupakan ruang *seba*, yaitu ruang untuk rakyat menghadap rajanya, juga merupakan ruang hiburan (acara *rampog macan, sekaten, dhugdheran*) sebagaimana terlihat pada Gambar 4. Konsep lokal itu tidak ditemukan pada konsep ruang terbuka dari Barat ketika diterapkan dalam perancangan kota di Indonesia.

Sebuah kearifan lokal tentang alun-alun telah dirancang di Kota Semarang pada 1953. Pada saat Alun-Alun Lama Semarang menunjukkan gejala akan tertutup ruang terbukanya oleh kegiatan pasar, dirancanglah tiruan alun-alun yang dirancang Soekarno di kawasan baru di Kota

Semarang. Alun-alun baru itu meniru konsep lokal sebagai tempat *seba* dan tempat berkumpul. Dengan demikian, alun-alun baru ini dirancang untuk dapat menampung lebih dari 100 ribu rakyat. Dalam gagasan Soekarno, ketika menjadi presiden, alun-alun menjadi identitas kota di Jawa. Alun-alun di beberapa kota menjadi media untuk bertemu dengan rakyatnya (Rukayah dan Malik 2012).

Simpulan

Tata ruang pusat pemerintahan sebagai sebuah desain karya pemerintahan tradisional telah ada sebelum masa kolonial Belanda. Pusat kota terdiri atas alun-alun, Kanjengan, dan masjid. Pusat kota itulah yang disebut kearifan lokal sebagai ruang pemerintahan, ekonomi, dan kultural. Pendapat ini sesuai dengan teori alun-alun sebagai ruang yang multifungsi.

Berbagai acara yang digelar di alun-alun diselenggarakan atau dikendalikan oleh pemerintah yang berperan sebagai pemimpin pemerintahan dan agama, sebagaimana fenomena di Alun-Alun Lama yang masih menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara kultural dan ritual Islam. Pembangunan jalur *postweg* yang melewati kawasan pemerintahan tradisional telah memudahkan Pemerintah Kolonial Belanda mengawasi pemerintah lokal. Apalagi, pusat pemerintahan kolonial berada sejajar dengan pusat pemerintahan tradisional. Demikian pula *open space*/alun-alun dan Taman *Wilhelmina Plein* yang telah menjadi sumbu penarik.

Open space karya pemerintah kolonial memiliki nuansa modern dengan adanya ruang publik dan ruang hiburan yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Keberadaan alun-alun lama mewakili ruang terbuka kota tradisional dan *Wilhelmina Plein* sebagai ruang terbuka modern.

Hasil analisis menunjukkan adanya *postweg* memungkinkan Pemerintah Kolonial Belanda membangun pusat pemerintahan di sepanjang jalur. Sejak masa VOC, pusat-pusat pemerintahan dibangun berdekatan dengan pemerintah lokal untuk memudahkan pengawasan seiring dengan pembangunan jalur *postweg*, pemerintahan kolonial berada dan berproses bersamaan dengan pusat pemerintahan tradisional (*ndalem*) di Alun-Alun Lama Semarang. Paper ini memiliki peluang

sebagai riset lanjutan mengingat Pemerintah Kolonial Belanda ketika membangun pusat-pusat pemerintahan di kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya, masing-masing memiliki keunikan. Oleh sebab itu, direkomendasikan agar ada upaya konservasi kedua *open space* bagi pemerintah yang berbasis pada kearifan para perancang kota sebelumnya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Diponegoro atas dukungan pendanaan penelitian dengan No. 257-91/UN7.6.1/PP/ 2021.

Referensi

- Antariksa. 2008. "Sejarah dan Konservasi Perkotaan Sebagai Dasar Perancangan Kota." *Architecture Articles Friday, 18 July 2008*, 1–14.
- Anwar, Widya Fransiska F., Ismail Said, Dilhsan R. Ossen, and Muh. Hisyam Rasyidi. 2012. "Method to Elicit Local Wisdom in Perceiving the Transformation of Historical Living Environment." *Review of Urbanism and Architectural Studies* 10 (1): 11–22. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2012.01.01.2>.
- Ariestadi, Dian, and Lisa Dwi Wulandari. 2017. "Architecture, Space and Power in Historical Multi-Ethnic City Gresik Architecture, Space and Power in Historical Multi-Ethnic City Gresik." *MATEC Web Conference* 101. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201710105027>.
- Atmiko, Nugroho. 2001. "Keterkaitan Perkembangan Kota Dengan Perubahan Jammu It I Kawasan (Studi Kasus: Koridor Rojong-Semarang)." Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Badan Pariwisata Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan. 2011. *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Jakarta: Badan

- Pariwisata Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan.
- Bakar, Aboe. 1955. *Sedjarah Masjid. Banjarmasin: Toko Buku Adil*. Yogyakarta: Yogyakarta: Fa. Toko Buku Adil.
- Budihardjo, Rachmat. 2012. "Sistem Pemerintahan Kerajaan Pengaruhnya Terhadap Arsitektur Bali." *NALARs* 11 (2): 161–80.
- Budiman, Amen. 1978. *Semarang Riwayatmoe Doeloe*. Semarang: Semarang: Tanjung Sari.
- Colombijn, Freek. 2012. "Modernization of the Indonesian City, 1920-1960," no. Barlow: 1–26.
<https://doi.org/10.1163/9789004280724>.
- Dahlioni, Muhammad Faqih, and Arina Hayati. 2015. "Changes of Architecture Expressions on Lanting House Based on Activity System on the River." *History Research* 3 (1): 1–8.
- Dewi, Ika, and Retno Sari. 2012. "Kota Lama Semarang ' Situs Sejarah Yang Terpinggirkan ' Old City of Semarang ' The Abandoned Historical Site." 32 (2): 195–208.
- Geldern, Heine Robert. 1982. *Konsepsi Tentang Negara Dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: CV Rajawali.
- Harsritanto, Bangun Indrakusumo Radityo. 2009. "Revitalisasi Taman Wilhelmina-Tugu Muda Sebagai Salah Satu Node Downtown Citra Semarang." *4th International Symposium of Nusantara Urban Research Institute (NURI) "CHANGE*, 505–9.
- Kasmadi, Hartono. 1984. *Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-1950)*. Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jakarta, Indonesia: Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Krier, Rob. 1991. *Urban Space*.
https://doi.org/umkc_nichols_na9053_s6_K7413_1979b.
- Krisprantono. 2009. "Mencari Jejak Benteng 'De Vijfhoek' Di Kota Lama Semarang Melalui Pendekatan Sejarah." *AMERTA* 27 (1).
<https://doi.org/10.24832/amt.v27i1.436>.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana..
- Langstraat, Florian, and Rianne van Melik. 2013. "Challenging the 'End of Public Space': A Comparative Analysis of Publicness in British and Dutch Urban Spaces." *Journal of Urban Design* 18 (3): 429–48.
<https://doi.org/10.1080/13574809.2013.800451>.
- Liem, Thian Joe. 2004. *Riwayat Semarang*. Semarang: Hasta Wahana.
- Purwanto, L.M.F. 2005. "Kota Kolonial Lama Semarang (Tinjauan Umum Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota)." *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)* 33 (1): 27–33.
<https://doi.org/10.9744/dimensi.33.1>.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Batas-Batas Pembaratan*. Vo1. PT Gramedia Pustaka Utama.
- van Melik, Rianne, Irina van Aalst, and Jan van Weesep. 2009. "The Private Sector and Public Space in Dutch City Centres." *Cities* 26 (4): 202–9.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2009.04.002>.
- Moughtin, Cliff. 2003. *Urban Design: Street and Square*. Oxford: An Imprint of Butterworth Heinemann Ltd, Linacre House.
- Mulyana, Slamet. 1968. *Runtuhnya Keradjaan Hindu Djawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara / Slamet Mulyana*. Jakarta: Bhratara.
- Mustaruddin, Mustaruddin, Nasruddin Nasruddin, Sadarun Sadarun, Firman Kurniawan, and Mulyono S Baskoro. 2011. "Karakteristik Perairan Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Usaha Perikanan Pelagis Besar Di Kabupaten Aceh Jaya." *Buletin PSP* 19 (1).
- Pole, Christopher J. 2004. *Seeing Is Believing? Approaches To Edited By. Studies in Qualitative Methodology Volume 7*. Vol. 7.
- Nas, Pratiwo. 2002. "Java and De Groote Postweg, La Grande Route, the Great Mail Road, Jalan Raya Pos" 158: 707–25.

- Rapoport, Amos, and Sabine el Sayegh. 2005. *Culture, Architecture, and Design*. Washington: Locke science publishing Company Washington.
- Rukayah, R Siti. 2010. *Simbiosis Di Ruang Terbuka Kota Simpang Lima Di Kota Semarang Simbiosis Di Ruang Terbuka Kota Simpang Lima Di Kota Semarang*. Phd Dissertation, not published.
- Rukayah, R Siti, Respati Dhanang, and Susilo and Endang. 2016. "Morphology of Traditional City Center in Semarang: Towards Adaptive Re- Use in Urban Heritage." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 1 (4): 109–18.
- Rukayah, R Siti, and Abdul Malik. 2012. "Between Colonial, Moslem, and Post-Independence Era, Which Layer of Urban Patterns Should Be Conserved?" *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 68: 775–89. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.266>.
- Rukayah, R Siti, Puguh Dhanang Respati, and Setiyorini Endang Sri Susilo. 2016. "Morphology of Traditional City Center in Semarang: Towards Adaptive Re- Use in Urban Heritage." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 1 (4): 109–18. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v1i4.91>.
- Rukayah, R. Siti, Totok Roesmanto, and Sukawi. 2013. "The Sustainability Concept of Alun-Alun as a Model of Urban Design in the Future." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 85: 626–37. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.390>.
- Rukayah, R. Siti, Endang Sri Susilo, and Muhammad Abdullah. 2018. *Semarang Kota Pesisir Lama*. Yogyakarta: Yogyakarta: Tekno Sain.
- Rukayah, R. Siti, Endang Sri Susilo, Muhammad Abdullah, and Siddhi Saputro. 2018. "Exploring The Position Of Old Semarang Sea Port: Based on Javanese City Pattern." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 116 (1): 0–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/116/1/012036>.
- Rukayah, R. Siti, Wahyul Amien Syafei, Muhammad Abdullah, and Annica Etenia. 2021. "The Diversity of Multi-Ethnic Dutch Area Corridors Leading to the City Square of Semarang, Indonesia." *ISVSE-Journal* 8 (1): 1–22.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2009. *Api Sejarah 1. Sejarah Islam Di Nusantara*. Bandung: Bandung: Salamadani.
- Talens, Johan. 1993. "Ritual Power; The Installation of a King in Banten, West Java, in 1691." *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 149 (2): 333–55.
- Toer, Pramodya Ananta. 2005. *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Totok Roesmanto. 2003. "Penelusuran Wajah Bangunan Kuno De Vredestein." *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 31 (2): 75–87.
- Wessing, Robert. 1992. *A Tiger in The Heart : The Javanese Rampok Macan*. Vol. 148. Nederland: Netherland: KITLV.
- Yuliati, Dewi. 2019. "Mengungkap Sejarah Kota Lama Semarang dan Pengembangannya sebagai Asset Pariwisata Budaya." *ANUVA* 3(2): 157-171.
- Zucker, Paul. 1959. "The Philosophy of Art History." *Journal of Aesthetics and Art Criticism*.